

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan ekonomi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah dan kinerja sektor publik. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini persaingan semakin ketat memaksa pemerintah untuk mendorong warga masyarakat pelaku ekonomi untuk ikut terlibat dalam persaingan ini. Untuk mengikuti persaingan global maka dibutuhkan modal, modal dalam hal ini tidak terbatas pada finansial saja atau keuangan tapi juga pada tingkat intelektual pengetahuan. Hal ini bisa kita peroleh dari sektor publik, sektor publik yang penulis maksudkan ini adalah sektor pendidikan. Karena dari pendidikan akan membentuk corak karakter, moral, tanggung jawab, serta pemahaman pengetahuan suatu masyarakat yang akan berperan aktif dalam kegiatan perekonomian.

Pemerintah secara khusus mengatur UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Menurut UU no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Selain dengan diberlakukannya undang-undang tentang pendidikan pemerintah juga mengeluarkan anggaran sebesar 20% untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan. Tapi anggaran tersebut ternyata tidak cukup untuk membiaya semua kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia. Pihak sekolah masih memungut Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), dan dari tahun ketahun biaya pendidikan terus mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan kemajuan zaman yang semakin canggih dan modern sehingga pihak sekolah perlu menyediakan fasilitas teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Pihak sekolah harus membuat kebijakan terkait pengendalian biaya dan penentuan tarif dengan menggunakan sistem akuntansi yang tepat guna menghasilkan informasi biaya yang akurat sesuai dengan aktivitas yang terjadi.

Metode *Activity Based Costing* (ABC) dapat membantu pihak manajemen sekolah untuk menyediakan informasi yang akurat dan terperinci yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya. Metode ini memiliki penerapan penelusuran biaya-biaya yang lebih menyeluruh dibanding dengan metode tradisional. Sehingga dengan *Metode Activity Based Costing* dapat menyajikan informasi jasa secara cermat dan akurat bagi kepentingan manajemen sekolah. ABC merupakan sistem informasi biaya yang menyediakan informasi lengkap tentang aktivitas yang memungkinkan perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas.

Metode ini memiliki dasar pemikiran bahwa biaya ada penyebabnya, dan penyebab biaya dapat dikelola (Mulyadi, 2003)

Biaya produk yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya tradisional memberikan informasi biaya yang terdistorsi.), distorsi timbul karena adanya ketidakakuratan dalam pembebanan biaya, sehingga mengakibatkan kesalahan penentuan biaya, pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Distorsi tersebut juga mengakibatkan undercost/ overcost terhadap produk. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian pada tahun 1800-an dan awal 1900-an lahirlah suatu sistem penentuan harga pokok produk berbasis aktivitas yang dirancang untuk mengatasi distorsi pada akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi ini disebut Activity Based costing. Definisi metode Activity Based Costing (ABC) merupakan suatu sistem kalkulasi biaya yang pertama kali menelusuri biaya keaktivitas dan kemudian keproduk. (Femala, 2007).

Perbedaan utama perhitungan tarif DPP antara akuntansi biaya tradisional dengan ABC adalah jumlah cost driver (pemicu biaya) yang digunakan. Dalam metode ABC, menganggap bahwa timbulnya biaya disebabkan oleh adanya aktivitas yang dihasilkan produk. Pendekatan ini menggunakan cost driver yang berstandar pada aktivitas yang menimbulkan biaya (Femala, 2007)

MTs. Mamba'ul Ulum merupakan salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Jepara. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan menjadikan segala sesuatu yang ada pada tiap satuan pendidikan harus dikelola oleh masing-masing sekolah meskipun di dalamnya masih terdapat peran serta pemerintah pusat. Salah satu komponen yang dikelola oleh sekolah adalah biaya pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan. DPP merupakan salah satu pendapatan sekolah yang menunjang kegiatan belajar-mengajar.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan alternatif pilihan kepada MTs. Mamba'ul Ulum mengenai penentuan tarif DPP berdasarkan metode ABC. Peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui perhitungan tarif DPP menggunakan metode ABC. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mereplikasi penelitian sebelumnya dengan mengambil judul “ANALISIS PENGGUNAAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DALAM MENENTUKAN DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ( DPP ) PADA MTs. MAMBA'UL ULUM”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian, jangka waktu penelitian, periode penelitian, serta lokasi penelitian dan dari pendeskripsian hasil penelitian.

## 1.2 Ruang Lingkup

Agar dalam pembahasan lebih terarah dan berjalan dengan baik maka perlu adanya ruang lingkup atau batasan penelitian yaitu :

1. Definisi sekolah dan jenis – jenis sekolah
2. Akuntansi biaya dan definisi dari biaya tersebut
3. Pemahaman terhadap konsep Activity Based Costing
4. Penelitian ini membahas tentang penghitungan tarif DPP dengan menggunakan metode ABC



5. Membandingkan hasil perhitungan biaya menggunakan metode tradisional dan Metode Activity Based Costing

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan Dana Pengembangan Pendidikan ( DPP ) menurut MTs. Mamba'ul Ulum ?
2. Bagaimana perhitungan Dana Pengembangan Pendidikan ( DPP ) menurut Metode Activity Based Costing ?
3. Apakah terdapat perbedaan antara perhitunagn Dana Pengembangan Pendidikan ( DPP ) yang digunakan pada MTs. Mamba'ul Ulum dengan perhitungan menurut Metode Activity Based Costing?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perhitungan yang dilakukan oleh MTs. Mamba'ul Ulum.
2. Untuk mengetahui perhitungan tarif DPP dengan metode activity Based Costing pada MTs. Mamba'ul Ulum.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara perhitungan Dana Pengembangan Pendidikan ( DPP ) yang digunakan pada MTs. Mamba'ul Ulum dengan perhitungan DPP menurut Metode Activity Based Costing.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam penerapan Activity Based Costing menurut teori dan kondisi nyata di lapangan.
  - b. Mengetahui perbandingan, kelebihan, dan kekurangan secara langsung yang berkaitan dengan teori Activity Based Costing dengan keadaan sebenarnya.
2. Bagi MTs. Mamba'ul Ulum
  - a. Sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam mengambil kebijakan dalam penentuan tarif DPP dengan menggunakan metode Activity Based Costing.
  - b. Sebagai acuan atau sumber referensi dimasa datang jika membutuhkan informasi mengenai Activity Based Costing (ABC).
3. Bagi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
  - a. Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi perpustakaan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
  - b. Sebagai sumber atau bahan perbandingan bagi mahasiswa yang akan membuat tugas akhir atau skripsi mengenai perhitungan metode Activity Based Costing (ABC)